

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi global menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Menurut *World Inequality Report 2022*, pada tahun 2021, 10% penduduk dengan pendapatan tertinggi memperoleh 52% dari total pendapatan dunia, sedangkan 50% penduduk berpenghasilan terendah hanya memperoleh 8,5% (Chancel et al., 2022). Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga menghambat pertumbuhan inklusif dan memicu ketidakstabilan sosial.

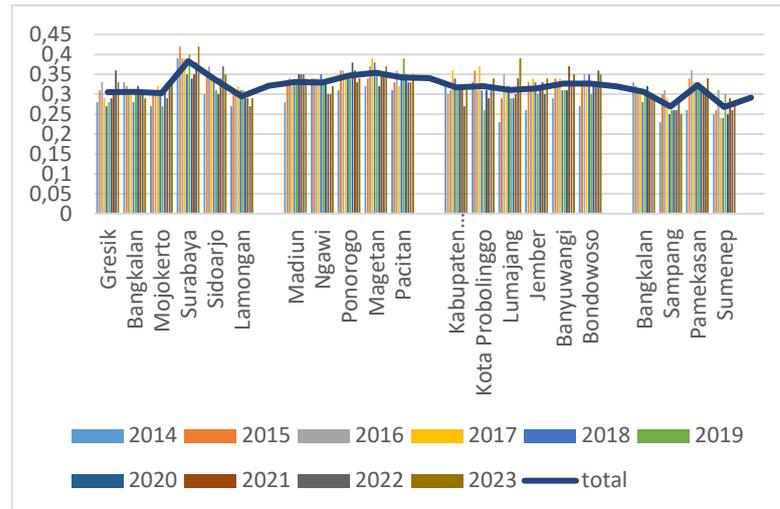
Ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan distribusi kekayaan yang timpang dalam masyarakat. Fenomena ini dapat ditemui di banyak negara, tidak hanya di negara – negara berkembang, tetapi juga di negara – negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, 1% penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai 20% dari total kekayaan nasional, sementara kelompok berpendapatan terendah tidak mengalami peningkatan pendapatan selama 25 tahun terakhir (Bahagijo et al., 2014 dalam (Wibowo, 2016)).

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan serius bagi pencapaian pembangunan yang merata dan inklusif. Berdasarkan laporan OXFAM, (2017), empat individu dengan kekayaan tertinggi di Indonesia memiliki akumulasi kekayaan yang melebihi total kekayaan yang dimiliki oleh 1000 juta penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah. Target Gini Rasio dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 0,36 tidak tercapai, dengan realisasi nilai Gini Rasio sebesar 0,39 (Rifaldo & Rejekiingsih, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Indonesia berada pada gini ratio sebesar 0,38, yang artinya di tingkat ketimpangan sedang. Sebagai negara berkembang yang sedang bertransisi menuju negara berpendapatan menengah (middle-income trap), Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menekankan transformasi struktural, tetapi tanpa pemerataan pembangunan dan kesiapan tenaga kerja, transformasi ini berisiko memperparah pengangguran struktural dan ketimpangan antardaerah.

Ketimpangan antardaerah menjadi persoalan nyata di berbagai provinsi, termasuk di Jawa Timur. Provinsi ini merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional dengan basis industri, perdagangan, dan agribisnis yang kuat. Infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi mendukung aktivitas ekonomi yang pesat, terutama di wilayah-wilayah perkotaan. Namun, disparitas pembangunan antara kawasan barat, tengah, dan timur Jawa Timur masih sangat terlihat. Untuk itu, pemerintah provinsi membagi wilayah ini ke dalam empat kawasan pengembangan strategis: Gerbangkertosusila, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura Raya. Pembagian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang memiliki perbedaan dalam karakteristik sosial dan ekonomi.

Masing-masing kawasan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas, yang turut memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah.. Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, grafik di bawah menyajikan data *Gini Ratio* dari tahun ke tahun sebagai indikator ketimpangan pendapatan di masing-masing kawasan.



Gambar 1. 1 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Ekonomi Kawasan Jawa Timur

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data *Gini Ratio* tahun 2014-2023 menunjukkan adanya variasi tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Jawa Timur. Rata-rata *Gini Ratio* di kawasan Mataraman mencapai (0,34), yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Gerbangkertosusila (0,32), Tapal Kuda (0,31), maupun Madura Raya (0,29). Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kawasan Mataraman secara konsisten mencatatkan nilai *Gini Ratio* tertinggi dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antarwilayah di dalam kawasan Mataraman cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian khusus.

Salah satu subwilayah yang termasuk dalam kawasan Mataraman adalah Selingkar Wilis, yang terdiri dari tujuh kabupaten yaitu Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ketujuh kabupaten ini memiliki keterkaitan spasial, geografis, dan arah pembangunan yang relatif serupa, sehingga dapat dianalisis sebagai satu kesatuan wilayah. Dengan tingkat ketimpangan yang tinggi di kawasan Mataraman, penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman

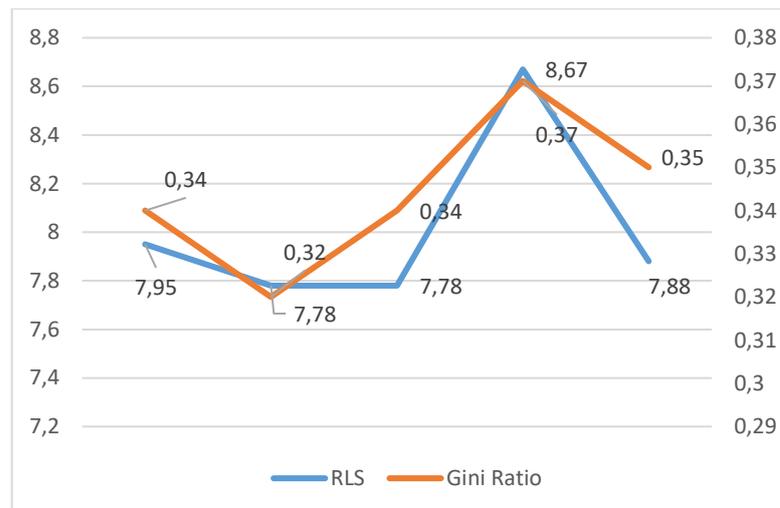
yang lebih komprehensif dan sesuai konteks terhadap dinamika ketimpangan pendapatan di tingkat regional.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi yang berbeda dibandingkan kawasan lain. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis berbagai faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman. Ketimpangan pendapatan yang terus berlangsung tanpa penanganan yang tepat dapat memengaruhi kestabilan sosial dan memperlambat proses pembangunan di wilayah tersebut.

Dalam memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, penelitian ini mengkaji berbagai variabel sosial dan ekonomi yang dipandang relevan, antara lain faktor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta faktor ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masing-masing faktor memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor sosial yang diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan dalam pencapaian pendidikan muncul akibat perbedaan akses dan kesempatan yang dimiliki individu untuk mengenyam pendidikan. Akses pendidikan yang tidak merata dapat mempengaruhi peluang individu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya turut memperlebar kesenjangan pendapatan antarkelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), ketimpangan pencapaian pendidikan di Indonesia dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Data menunjukkan bahwa wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi. Grafik di bawah ini menyajikan perbandingan antara capaian pendidikan (RLS) dan tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Perbandingan ini diharapkan dapat memperjelas hubungan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan, serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam peningkatan akses pendidikan.



Gambar 1. 2 Rata-rata Lama Sekolah terhadap Gini Ratio di Kawasan Mataraman Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

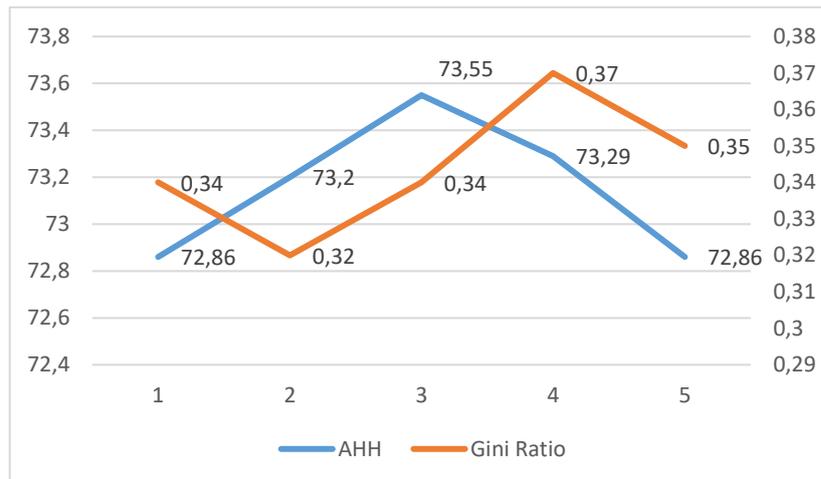
Data Rata - rata Lama Sekolah (RLS) dan Gini Rasio tahun 2023 di lima kabupaten kawasan Mataraman menunjukkan variasi yang mencerminkan hubungan kompleks antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan. Kabupaten Magetan mencatat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi (8,67) sekaligus Gini Rasio tertinggi (0,37), yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

Menurut Wahyuni & Monika (2016), pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan mempersempit ketimpangan pendapatan di Kawasan Mataraman, Jawa Timur. Ketimpangan dalam pencapaian pendidikan mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam mengakses lapangan kerja yang berkualitas, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan alokasi investasi di sektor pendidikan merupakan strategi yang penting dalam upaya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial lainnya, seperti kesehatan. Akses yang merata terhadap pendidikan perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup, terutama melalui kesehatan yang baik, agar produktivitas tenaga kerja dapat optimal.

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai ukuran penting dalam mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, dengan mengestimasi rata-rata usia yang diperkirakan dapat dicapai individu sejak saat kelahiran. Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan data hasil sensus dan survei kependudukan (BPS, 2022), serta menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

Ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan juga berpotensi memperburuk kesenjangan pendapatan di Kawasan Mataraman. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hubungan antara kesehatan dan ketimpangan pendapatan, berikut ini disajikan grafik yang menggambarkan peran kesehatan dalam memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.



Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup terhadap Gini Ratio di Kawasan Mataraman Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.3 mengindikasikan bahwa hubungan antara Angka Harapan Hidup (AHH) dan tingkat ketimpangan pendapatan di Kawasan Mataraman tidak selalu menunjukkan pola yang linier. Kabupaten dengan Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi, yaitu 73,55, justru mencatat Gini Rasio sebesar 0,34 yang tergolong dalam kategori ketimpangan sedang. Sebaliknya, kabupaten dengan AHH terendah, yaitu 72,86, memiliki Gini Rasio yang lebih tinggi, yakni 0,35.

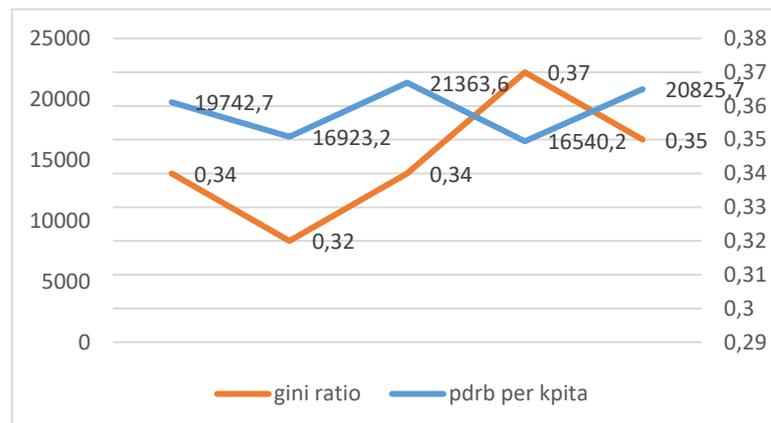
Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) tidak selalu sejalan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, perannya dalam menekan ketimpangan pendapatan perlu dilihat secara lebih komprehensif. Rendahnya tingkat kesehatan di masyarakat dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena terbatasnya kemampuan untuk bekerja secara optimal (Nurlaila Maysaroh & Qintharah, 2022), sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat perlu dibarengi dengan pemerataan akses layanan dan kebijakan sosial yang mampu menjangkau seluruh kelompok pendapatan.

Perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman mengindikasikan bahwa selain faktor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk pola distribusi pendapatan. Dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah, diperlukan suatu indikator yang dapat mencerminkan rata-rata pendapatan per individu.

Salah satu faktor ekonomi yang relevan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu. Indikator ini dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu total PDRB suatu wilayah dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut (Ibrahim, 2019). Semakin tinggi nilai PDRB dan semakin rendah jumlah penduduk, maka semakin besar pula nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menggambarkan potensi kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antarwilayah sering kali mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Oleh karena itu, indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya menekan ketimpangan (Lestari et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis hubungan antara PDRB dan Gini Rasio di Kawasan Mataraman guna memahami lebih mendalam mengenai pola distribusi pendapatan.



Gambar 1. 4 PDRB per Kapita terhadap Gini Ratio di Kawasan Mataraman Tahun 2023

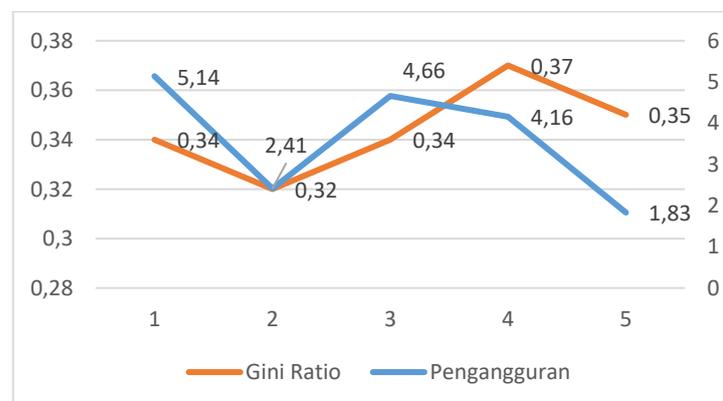
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data di atas, terdapat hubungan yang menarik antara PDRB dan Gini Rasio di kawasan Mataraman pada tahun 2023. Grafik menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan Gini Rasio tidak selalu berbanding lurus. Ketika PDRB per kapita mencapai nilai tertinggi sekitar 21.363,6, Gini Rasio justru berada pada tingkat ketimpangan sedang. Sebaliknya, saat PDRB per kapita berada pada titik terendah sekitar 16.540,2, Gini Rasio justru meningkat ke angka tertinggi, yaitu 0,37. Pola ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata pendapatan daerah belum tentu diikuti oleh pemerataan pendapatan, sehingga PDRB per kapita perlu dilihat secara bersamaan dengan indikator ketimpangan seperti Gini Rasio untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

Ketimpangan pendapatan yang tetap tinggi meskipun PDRB per kapita meningkat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ketika sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat pada sektor atau wilayah tertentu saja, masyarakat yang berada di sektor informal atau wilayah pinggiran cenderung tertinggal dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian tidak hanya pada pertumbuhan PDRB per kapita, tetapi juga pada aspek

pemerataan, antara lain melalui penguatan sektor UMKM, pembangunan infrastruktur yang merata, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan inilah yang dapat menekan ketimpangan secara berkelanjutan.

Selain PDRB per kapita, tingkat pengangguran juga berperan penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dan lapangan pekerjaan yang dapat menyerapnya. Menurut Mankiw (2014) dalam (Hindun et al., 2019) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi di mana seseorang untuk sementara berhenti bekerja atau sedang dalam proses mencari pekerjaan, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, pengangguran diukur menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum terserap. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh TPT terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Mataraman, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Rasio.



Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Gini Ratio di Kawasan Mataraman Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio menunjukkan pola yang tidak selalu searah. Di awal periode, ketika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relative tinggi, ketimpangan justru menurun. Namun di pertengahan waktu, keduanya sama-sama meningkat. Menuju akhir periode, pengangguran menurun cukup tajam, sementara ketimpangan tetap fluktuatif dengan sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan pengangguran tidak serta-merta diikuti oleh penurunan ketimpangan, menandakan kemungkinan adanya distribusi pendapatan yang masih belum merata meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang.

Hal ini menegaskan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi angkatan kerja dan terbatasnya kualitas lapangan kerja justru dapat memperbesar ketimpangan yang ada. Dengan demikian, meskipun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, hal tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan pendapatan yang lebih baik, terutama bila pekerjaan yang tersedia tidak mampu menjamin kesejahteraan yang layak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika sosial ekonomi, termasuk aspek ketenagakerjaan, sangat penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa faktor sosial seperti pendidikan dan kesehatan turut memengaruhi tingkat ketimpangan secara signifikan.

Hasil penelitian terdahulu telah mengungkapkan adanya keterkaitan antara faktor sosial ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam Eko Wicaksono et al. (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, ketimpangan akses terhadap pendidikan berkontribusi pada perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan rendah. Di samping itu, variabel kesehatan juga terbukti berpengaruh secara signifikan, di mana keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berpotensi memperlebar jurang pendapatan antarindividu.

Selain itu dalam penelitian Janah (2022) mengungkapkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berarti peningkatan PDRB per kapita cenderung menurunkan tingkat ketimpangan. Sementara itu, hasil kajian Yoertiara & Feriyanto (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Pulau Jawa.

Dengan mengadopsi pendekatan spasial yang lebih kontekstual terhadap kawasan Mataraman, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur ketimpangan, khususnya pada wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Tujuannya bukan hanya untuk menjelaskan hubungan antarvariabel secara kuantitatif, tetapi juga untuk menghasilkan temuan empiris yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Dengan melihat keterkaitan antarwilayah serta faktor-faktor yang memengaruhi ketidakmerataan distribusi ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan strategi kebijakan yang relevan untuk menekan ketimpangan secara berkelanjutan di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan terkait pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di di Kawasan Mataraman

1. Apakah ada pengaruh Rata – Rata lama Sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman?
2. Apakah ada pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman?
3. Apakah ada pengaruh pengaruh PDRB per Kapita terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman?
4. Apakah ada pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Rata – Rata lama Sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman
2. Mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman
3. Mengetahui pengaruh PDRB per Kapita terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman
4. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Selingkar Wilis yang termasuk dalam kawasan Mataraman, Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang menjadi fokus kajian mencakup tujuh kabupaten, yaitu Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Trenggalek. Fokus utama dari penelitian ini adalah variabel terikat, yaitu ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel bebas meliputi pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi regional, khususnya dalam memahami faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di tingkat wilayah. Fokus pada kawasan Mataraman memungkinkan kajian ini untuk memperkaya literatur mengenai pengaruh determinan sosial-ekonomi terhadap distribusi pendapatan antarwilayah. Selain itu, penerapan analisis data panel dalam konteks regional diharapkan dapat memperluas cakupan metodologis dalam penelitian ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang valid dan berbasis data empiris bagi para pemangku kebijakan dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor sosial serta ekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah Mataraman. Temuan ini juga dapat dijadikan

acuan dalam merumuskan program pembangunan daerah yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing kabupaten.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk mengkaji isu ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor penentunya di level regional. Hasil yang diperoleh juga dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan studi lanjutan dengan pendekatan metodologi yang berbeda maupun penambahan variabel lain untuk memperkaya analisis mengenai dinamika ketimpangan pendapatan antarwilayah.